

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPK RI.2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan*, Semester II Tahun 2012.Jakarta.
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Jakarta :Salemba Empat.
- LAN. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Masmudi. 2003. *Laporan Keuangan Sektor Publik*, antara Konsep dan Praktek.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Narimawati Umi. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contohdan Perhitungannya*. Jakarta: Agung Media.
- Deddi Nordiawan, 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- Purwanto Suharyadi. 2004. *Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern*. Jakarta:Salemba Empat.
- Raho, Bernard, 2007, *Pengantar Sosiologi*, Penerbit : Pustaka Pelajar, Jakarta
- Soerjono Soekanto; 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta
- Umar Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.Jakarta:Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Permendagri 23 Nomor 2007 tentang *pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *pengelolaan keuangan daerah*.

Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*

Pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang *Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan* : Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*: laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.